

## BAB II

### DESKRIPSI SUBJEK/OBJEK PENELITIAN




#### 2.1. Peta Politik Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang selama dua periode berturut-turut dinahkodai oleh Gubernur Ganjar Pranowo kader akar rumput Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pada periode pertama di tahun 2013-2018 Ganjar Pranowo berpasangan dengan Heru Sudjatmoko (GAGAH) berkontestasi dengan *incumbent* Bibit Waluyo-Sudijono Sastroadmojo (BISSA) serta pasangan calon (paslon) Hadi Prabowo-Don Murdono (HP-Don). Pada periode kedua tahun 2018-2023 Ganjar Pranowo menggandeng Taj Yasin melenggang mulus dan berhasil memenangkan kembali dalam pertarungan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah melawan kandidat pendatang Sudirman Said-Ida Fauziah.

Kemenangan PDIP dibarengi oleh banyaknya kader partai pimpinan Megawati Soekarno Putri menduduki kursi anggota dewan Provinsi Jawa Tengah. Mengutip narasi *political culture in Indonesia* yang ditulis James Siegel, Claire Holt dan Benedict Anderson (Gaffar, 2006) menjabarkan bahwa konsep kekuasaan masyarakat Jawa bersifat konkret, besarnya konstan, sumbernya homogen dan tidak berkaitan dengan persoalan legitimasi. Hal ini terlihat di Jawa Tengah dari partai politik pengusung pemenang Gubernur dan Wakil Gubernur akan menjadi partai pendorominasi di segala lini termasuk posisi anggota dewan. Hakikat dari partai politik merupakan sekelompok orang-orang mempunyai orientasi, cita-cita, kepentingan serta tujuan yang sama untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam rangka menterjemahkan program-program yang telah disetujui bersama dengan berusaha meraih kekuasaan sehingga dapat mengontrol pelaksanaan pemerintahan (Handoyo & Lestari, 2017).

Tabel 2.1

## Bagan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Periode 2013-2018

Nomor Urut Pasangan	Kandidat Gubernur	Kandidat Wakil Gubernur	Foto	Partai Pengusung	Jumlah Suara	Persentase
1	<b>Hadi Prabowo</b>	<b>Don Murdono</b>	 <p>1</p> <p>DR. H. HADI PRABOWO, MM DR. H. DON MURDONO, SH, M.Si</p>	Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)	2.982.715	20,92%
2	<b>Bibit Waluyo</b>	<b>Sudijono Sastroadmojo</b>	 <p>2</p> <p>H. BIBIT WALUYO PROF. DR. SUDIJONO SASTROADMOJO, M.Si</p>	Partai Demokrat, Partai Golongan Karya (GOLKAR), Partai Amanat Nasional (PAN)	4.314.813	30,26%
3	<b>Ganjar Pranowo</b>	<b>Heru Sudjarmoko</b>	 <p>3</p> <p>H. GANJAR PRANOWO, SH DR. H. HERU SUDJARMOKO, M.Si</p>	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	6.962.417	48,82%

Sumber: KPU Jawa Tengah

Tabel 2.2

Bagan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Periode 2018-2023

Nomor Urut Pasangan	Kandidat Gubernur	Kandidat Wakil Gubernur	Foto	Partai Pengusung	Jumlah Suara	Persentase
1	<b>Ganjar Pranowo</b>	<b>Taj Yasin</b>	<p style="text-align: center;"><b>1</b></p>  <p style="text-align: center; font-size: small;">H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.IP - H. TAJ YASIN</p>	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrasi (NASDEM), Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	10.362.694	58,78%
2	<b>Sudirman Said</b>	<b>Ida Fauziyah</b>	<p style="text-align: center;"><b>2</b></p>  <p style="text-align: center; font-size: small;">SUDIRMAN SAID - Dra. IDA FAUZIYAH</p>	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7.267.993	41,22%

Sumber: KPU Jawa Tengah

Dari perbandingan dua data tabel di atas menunjukkan bahwasanya PDIP sebagai partai pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Tengah menjadi pemenang baik dalam pilgub maupun pileg. Ada satu dimensi dimana hubungan antara partai dengan massa di Indonesia ialah kecenderungan terpusatnya dukungan partai tertentu di daerah tertentu (Sanit, 2008). Masyarakat Indonesia menganut budaya kolektivistik dan paternalistik yang berarti bahwa nilai, harapan dan cita-cita, pilihan atau keputusan individu masih sangat dipengaruhi oleh pemimpin kelompoknya (Mulyana, 2013, p. 66). Di Jawa Tengah sendiri partai banteng mendominasi hingga kursi anggota dewan tingkat provinsi. Masyarakat Jawa Tengah seakan terpusat memilih partai “banteng” dalam beberapa periode terakhir. Dominasi ikatan primordial di tubuh masyarakat membawa dampak dalam kehidupan politik (Djafar, 2015, p. 71).

Sistem multipartai di Indonesia juga membuat masyarakat bergerak mengenderai dan memilih partai politiknya berdasarkan ideologinya masing-masing. Tolok ukur pembeda antar partai politik dilihat dari ideologi. Ideologi merupakan suatu visi yang komprehensif dalam memandang segala sesuatu dan diformulasikan secara sistematis dari seseorang atau sekelompok orang mengenai tujuan yang akan dicapai dengan segala metode pencapaiannya (Labolo & Ilham, 2015). Asep Nurjaman mengelompokkan ideologi partai politik di Indonesia dalam empat kategori yaitu partai yang berideologi Kristen, partai yang berideologi nasional sekuler, partai yang berideologi Islam dan terakhir partai yang berideologi nasional religius (Labolo & Ilham, 2015). Meskipun PDIP sebagai partai pemenang namun masih ada partai politik lain di Jawa Tengah yang tidak bisa dipandang sebelah mata berhasil mempertahankan kelayakan para konstituennya. Sehingga bendera politik masyarakat di Jawa Tengah tidak terfokus dengan warna merah saja.

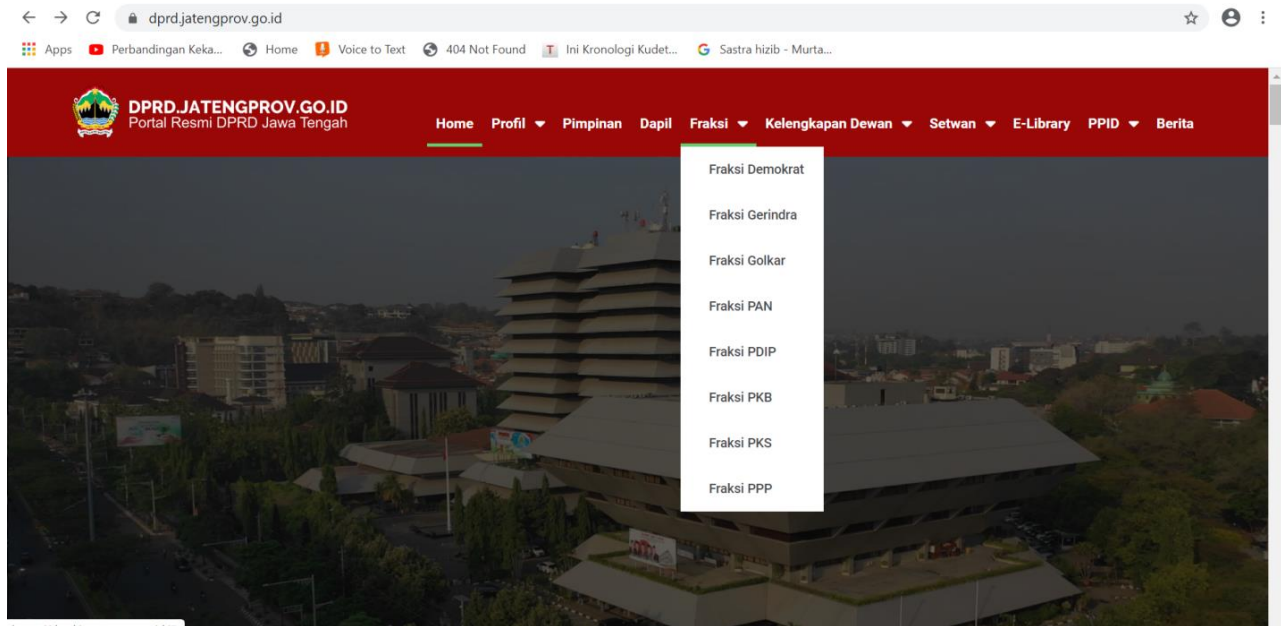
### **2.1.1. Gambaran Umum DPRD Provinsi Jawa Tengah**

Gedung bangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Mugassari Nomor 7 Kota Semarang, gedung tersebut diresmikan sejak 15 Juli 1991. Dikenal sebagai gedung berlian, bangunan tersebut seolah merekam dinamika internal perpolitikan Jawa Tengah dari masa ke masa. Realitas politik menunjukkan tidak semua partai politik bisa mempertahankan kekuasaannya dihati masyarakat.

Eksistensi partai politik di Jawa Tengah memiliki jejak perjalanan perpolitikan tersendiri. Partai politik berkembang masing-masing membawa ideologi tertentu antara lain liberalisme, komunisme, sosialisme, fasisme, kapitalisme, Kristen, Islam, atau Pancasila (Arifin, 2015, p. 91). Pertarungan politik yang diukur dari perolehan besaran jumlah suara partai politik di setiap pemilu membuat partai politik sekelas Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan PKNU tersingkir dari peredaran poros politik Jawa Tengah serta membuat partai politik bentukan Suryo Paloh yakni Nasional Demokrat (Nasdem) mendapatkan slot kursi di DPRD Jawa Tengah.

Setiap periode percaturan politik di Jawa Tengah berubah-ubah, dibutuhkan kekuatan masing-masing partai agar bisa meloloskan anggotanya menuju kursi parlemen. Kekuatan tidak berasal dari internal partai saja tetapi juga mempekuat dan memperluas basis massa pemilih di masyarakat syarat utama agar kader-kader partai politik mudah melenggang mendapatkan suara dari konstituen. Partai politik yang berhasil mendapatkan kursi akan dikelompokkan sesuai fraksinya.

Berikut ini akan sedikit dijabarkan perihal fraksi-fraksi anggota dewan di Jawa Tengah yang masih bisa bertahan hingga periode pemilihan 2019-2024. Informasi tersebut peneliti akses melalui website DPRD Provinsi Jawa Tengah. Perhatikan gambar 1.6 berikut ini.



### **2.1.1.1 Fraksi Demokrat**

Partai pimpinan Mantan Presiden Republik Indonesia ke-lima Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini pada masanya pernah memenangkan pemilu legislatif skala nasional. Berhasil membawa SBY memperoleh kursi Presiden Republik Indonesia selama dua periode penuh, Partai Demokrat tidak bisa dipandang sebelah mata dalam peredaran lingkaran politik di Indonesia. Namun Partai Demokrat tidak berhasil mengambil suara terbanyak di Jawa Tengah (Haris, 2014, p. 135). Hal itu bisa terlihat selama tiga periode terakhir jumlah kursi Fraksi Demokrat di DPRD Jawa Tengah mengalami penurunan, bukan mengalami peningkatan secara fluktuatif. Akan tetapi, Partai Demokrat masih bisa mempertahankan beberapa anggotanya menduduki kursi parlemen

di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Periode 2019-2024 ada delapan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah berasal dari Fraksi Demokrat.

Selain itu satu dari delapan anggota dewan Fraksi Demokrat adalah politisi perempuan. Dalam hal penguatan politisi perempuannya, Partai Demokrat di Jawa Tengah masih mampu menyokong dan mempertahankan politisi perempuan petahana di kursi parlemen tingkat provinsi bertahan selama dua periode berturut-turut.

### **2.1.1.2 Fraksi Gerindra**

Gerakan Indonesia Raya atau lebih sering disingkat Gerindra merupakan salah satu partai politik bentukan Prabowo Subianto yakni Menteri Pertahanan di Kabinet Presiden Joko Widodo periode 2019-2023. Sebagai partai yang baru lahir dari rahim perpolitikan Indonesia, Gerindra berhasil menggaet suara konstituen di Jawa Tengah terbukti selama tiga periode berturut-turut jumlah kursi Fraksi Gerindra mengalami peningkatan secara fluktuatif. Pada periode 2019-2024 Partai Gerindra mampu meloloskan 13 anggotanya menduduki kursi anggota dewan di Provinsi Jawa Tengah. Dari ke-13 politisi tersebut ada satu politisi perempuan petahana yang berhasil ikut diusung oleh partai berlambang garuda dan berhasil memperoleh serta menjaga suara konstituen di dapilnya.

Partai Gerindra dideklarasikan oleh sejumlah tokoh politik di Indonesia berangkat dari keprihatinan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tidak benar lagi karena hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu untuk memuluskan ambisinya. Maka pada 8 Februari 2008, Gerindra resmi dideklarasikan menjelang pilpres dan pileg. Kendati tergolong partai baru dan muda, gebrakan Partai Gerindra tidak bisa dipandang sebelah mata. Toh nyatanya banyak anggota Partai Gerindra berhasil menduduki pos-pos vital di pemerintahan termasuk di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

### **2.1.1.3 Fraksi Golongan Karya**

Berlambangkan bendera berwarna kuning dan pohon beringin, partai politik ciptaan sang maestro politik Indonesia yakni Akbar Tandjung berusaha konsisten mendapatkan suara dari konstituen di Provinsi Jawa Tengah. Meski tidak banyak politisi perempuan petahana yang dipertahankan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) di Jawa Tengah namun partai ini masih memperoleh tempat di hati masyarakat, terbukti dengan jumlah kursi yang diperoleh selama tiga periode berturut-turut meningkat meski periode sebelumnya sedikit mengalami penurunan.

Pada periode ini Partai Golkar berhasil menyumbangkan dua kadernya yang lolos menjadi politisi perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya yakni narasumber dalam penelitian ini dimana politisi perempuan tersebut berhasil memenangkan pilihan legislatif di dapilnya selama dua periode secara berturut-turut.

### **2.1.1.4 Fraksi Nasional Demokrat**

Tokoh politik Indonesia Suryo Paloh ikut meramaikan panggung politik dengan membangun partai politik Nasional Demokrat atau lebih sering disingkat Nasdem. Tampil sebagai partai baru namun keuletan anggota Partai Nasdem tidak bisa diremehkan di Jawa Tengah. Dua periode pemilihan legislatif berhasil melejitkan beberapa anggotanya memperoleh kursi anggota dewan di Jawa Tengah meskipun belum ada politisi perempuannya.

### **2.1.1.5 Fraksi PAN**

PAN tumbuh menjadi partai Islam yang kuat memancarkan pesan-pesan nasional, progresif, dan kosmopolit lewat geliat intelektual, perilaku dan visi para tokoh pendirinya (Cipto, 2008, p. 56). Partai bentukan salah satu punggawa Muhammadiyah yaitu Amien Rais memang berhasil memperoleh jamaahnya di pemiliha legislatif. Akan tetapi selama tiga periode berturut-



turut pileg tingkat provinsi, PAN di Jawa tengah mengalami penurunan jumlah kursi. Dan hanya ada satu politisi perempuan petahana yang hingga kini bisa bertahan di kursi dewan selama tiga periode berkelanjutan.

#### **2.1.1.6 Fraksi PDIP**

Jawa Tengah dikenal sebagai lumbung suara banteng. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri masih begitu eksis dibelantika perpolitikkan Indonesia. Jumlah suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengalami peningkatan secara drastis dan positif dari periode per periode. Bahkan partai berlambang banteng ini penyumbang suara politisi perempuan petahana terbanyak di kursi anggota dewan tingkat Jawa Tengah. Rombongan konstituen pemilih PDIP ini berhasil membuat PDIP menjadi fraksi terbanyak di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

#### **2.1.1.7 Fraksi PKB**

Keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bagian sumbangsih organisasi ummat Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bentuk peduli terhadap nasib demokrasi di Indonesia. Kekuatan tradisi pesantren dilihat masih memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan antar kyai pesantren termasuk dalam memilih partai politik (Ummatin, 2002, p. 85). Di Jawa Tengah sendiri PKB menduduki posisi kedua setelah PDIP. Kursi PKB selama tiga periode berturut-turut mengalami peningkatan dan partai ini juga termasuk partai yang mampu memberikan slot kursi politisi perempuan petahana bertahan dalam lingkaran pertarungan memperebutkan suara konstituen di Jawa Tengah.

#### **2.1.1.8 Fraksi PKS**

Memperluas dan memperdalam aktifitas dakwah Islam lewat Partai Politik dianggap paling tepat (Cipto, 2008, p. 63) sehingga terbentuklah Partai Keadilan (PK) yang mengubah namanya

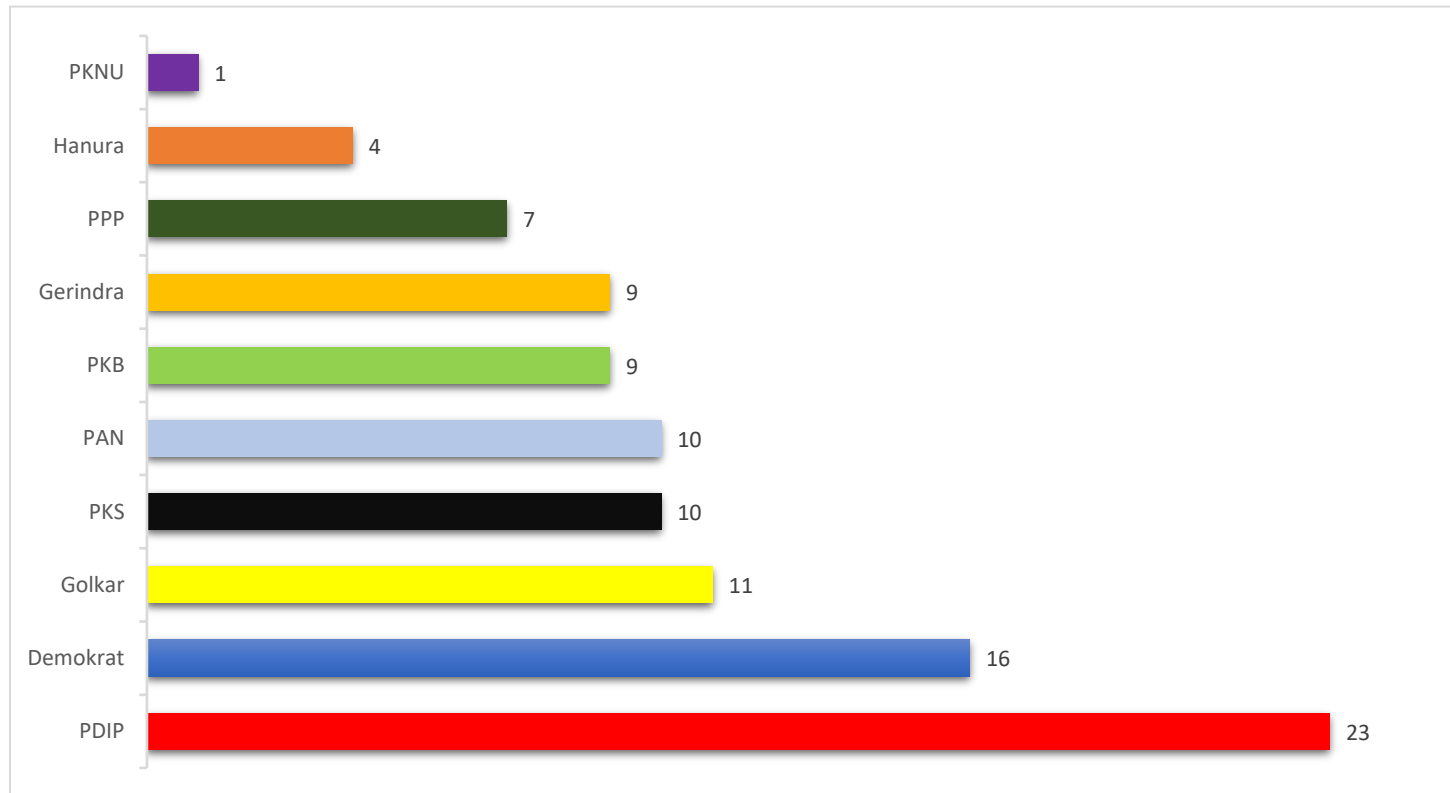
menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai yang terlahir setelah masa reformasi ini berhasil menjaga suara konstituennya di Jawa Tengah. Meski jumlah kursi anggota dewan provinsi dari PKS konstan, tidak mengalami peningkatan maupun penurunan paling tidak PKS tidak terdepak dari kotak politik Jawa Tengah. Namun PKS masih belum bisa mempertahankan posisi politisi perempuannya untuk bertahan selama beberapa periode di DPRD Jawa Tengah.

#### **2.1.1.9 Fraksi PPP**

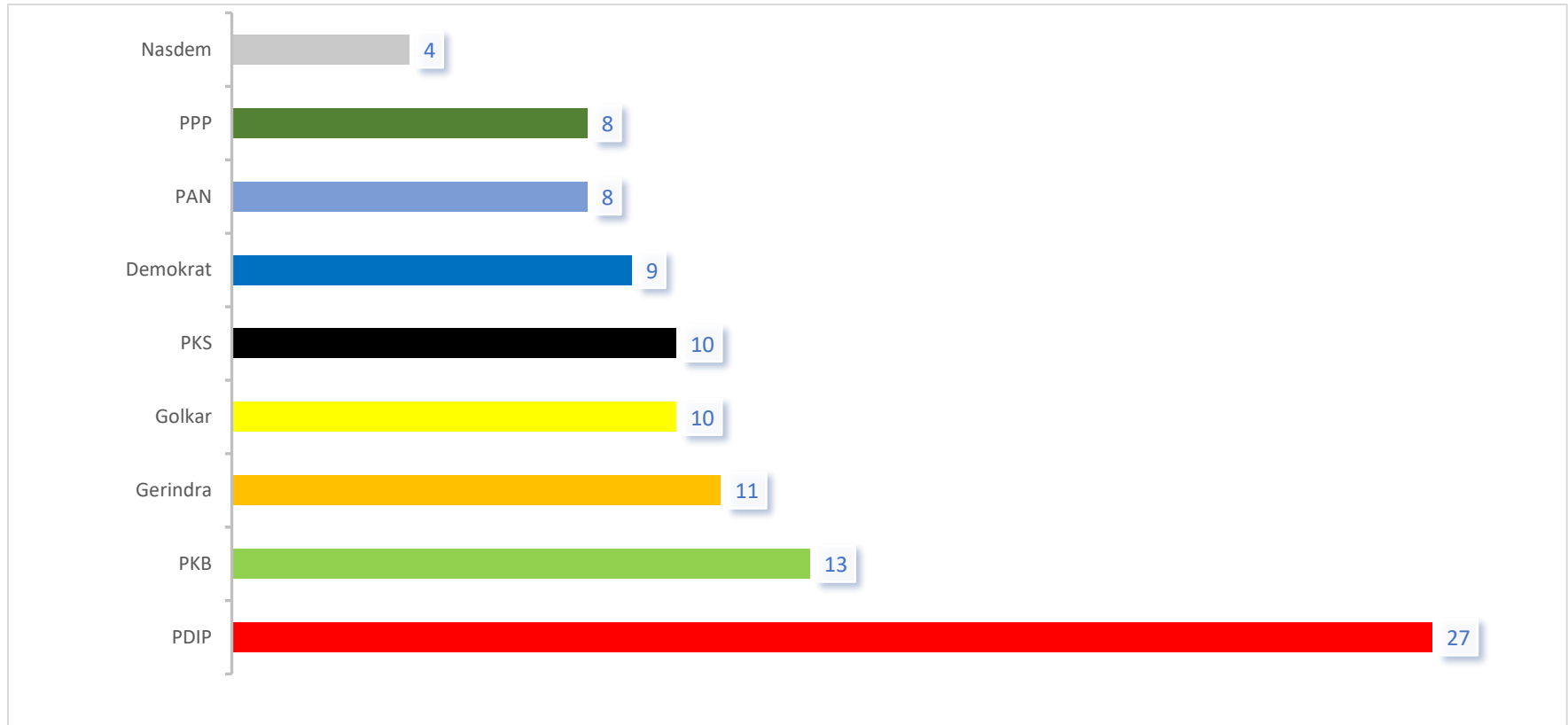
Menengok sejarah pemilihan umum (pemilu) 1999 PPP merupakan satu-satunya partai Islam yang mampu masuk sebagai partai lima besar dan memiliki basis dukungan paling luas serta menyebar (Haris, 2014, p. 69). Partai beratribut bendera warna hijau dan lekat dengan salah satu organisasi masyarakat di Indonesia ini cukup berhasil mempertahankan suara konstituennya di Jawa Tengah. Meski peningkatan jumlah kursi anggota dewan yang didapat tidak banyak dari tiga periode berturut-turut namun PPP tidak mengalami penurunan di DPRD Jawa Tengah.

Dari sedikit penjabaran mengenai fraksi yang berada di lingkaran DPRD Provinsi Jawa Tengah maka peneliti akan memberikan gambaran diagram kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah berdasarkan partai politik serta jenis kelamin. Perhatikan diagram-diagram di bawah ini:

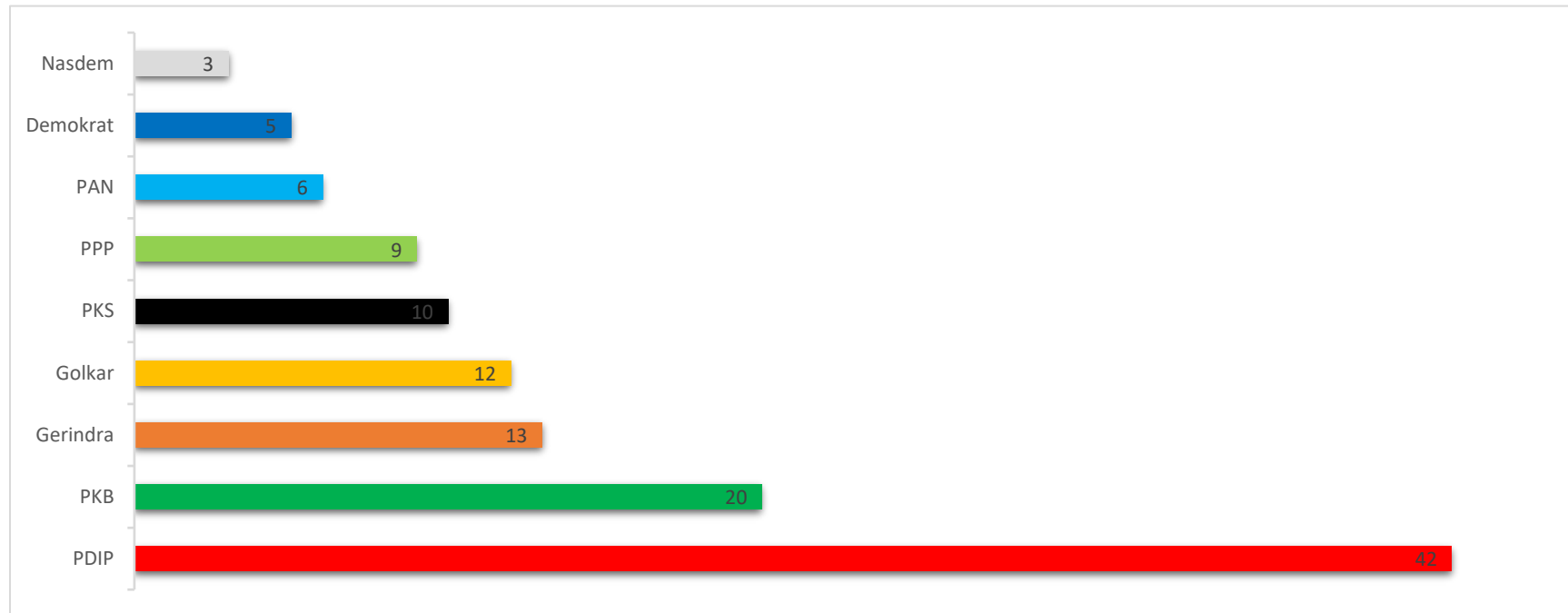
**Gambar 1.7 Diagram Kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2014**



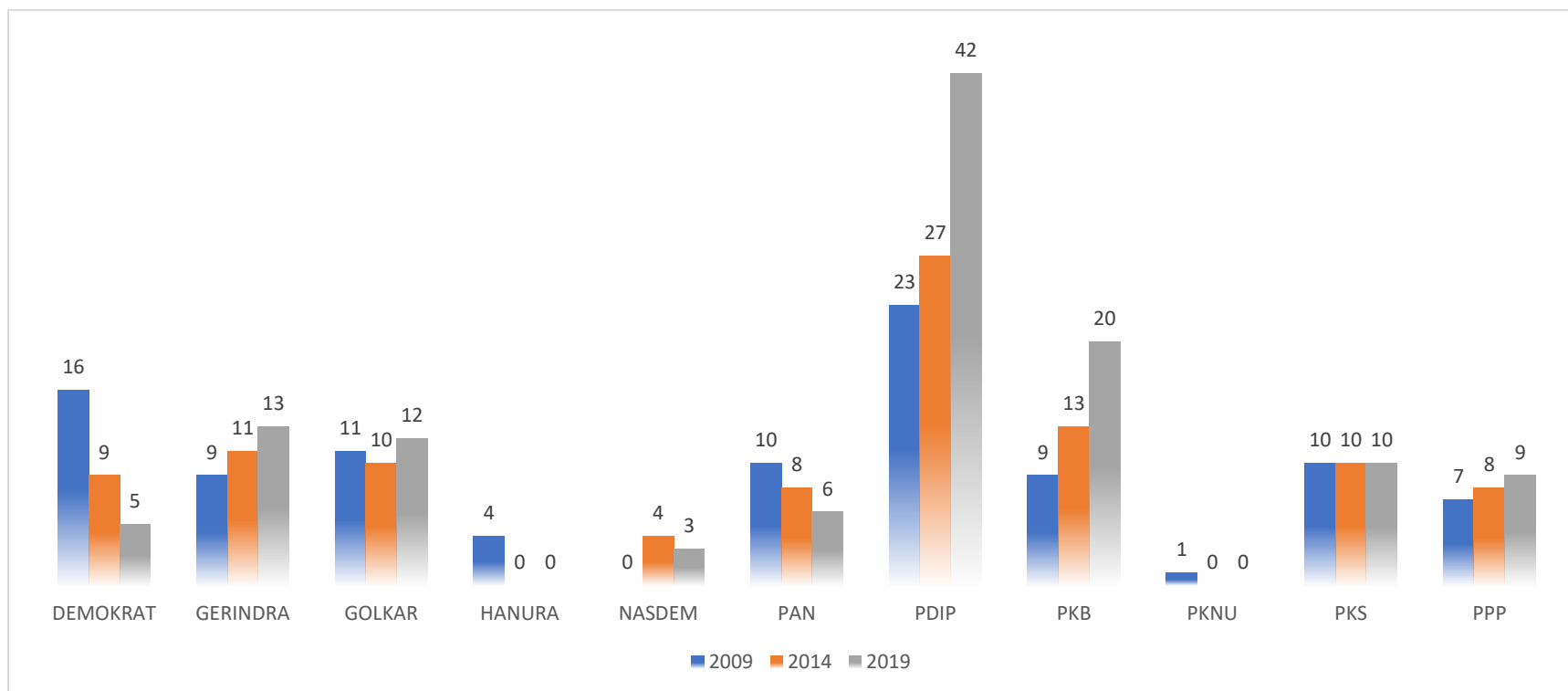
**Gambar 1.8 Diagram Kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2019**



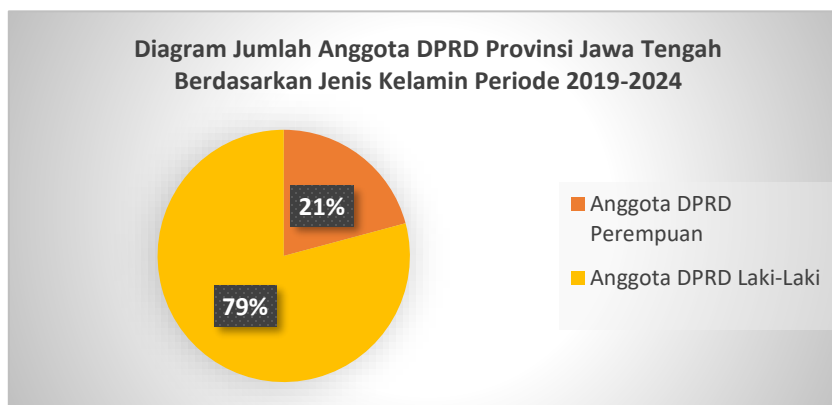
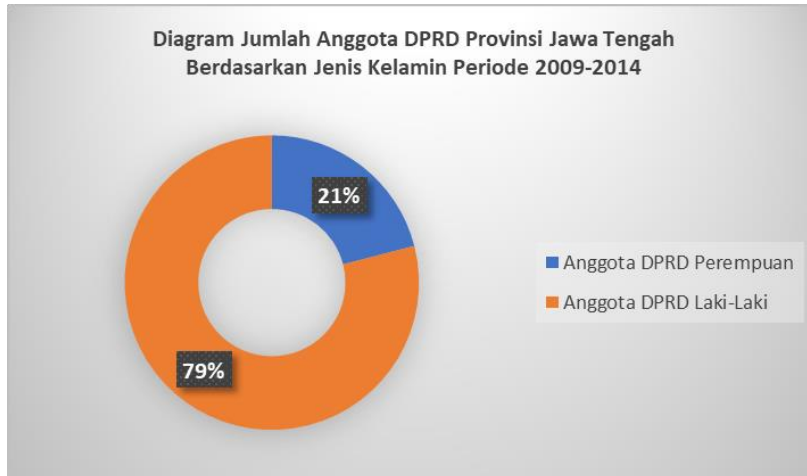
**Gambar 1.9 Diagram Kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024**



**Tabel 2.3 Jumlah Perbandingan Kursi DPRD Antar Partai Politik Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2024**



Perhatikan perbandingan diagram anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah berikut ini:



Berdasarkan diagram-diagram di atas apabila ditilik melalui nama besar partai, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan partai pemenang pilihan legislatif di Jawa Tengah. Sedangkan menyoroti sudut pandang anggota dewan lewat jenis kelamin dari tiga tahun terakhir, jumlah anggota dewan perempuan masih belum ada setengah dari jumlah anggota dewan laki-laki.

## **2.2 Komisi-Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah**

Dalam menjalankan fungsinya sebagai katalisator wakil rakyat, DPRD provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka mewakili representasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing para anggota dewan. Fungsi badan legislatif terpenting menentukan *policy* serta membuat undang-undang (Budiarjo, 2007, p. 182). Untuk mempermudah merealisasikan amanah sesuai ketiga fungsi tersebut maka dibentuklah komisi-komisi yang disusun berdasarkan kemampuan *focus issue* anggota dewan. DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki lima komisi, komisi tersebut merupakan bentuk ruang partisipasi mereka dalam mempertanggungjawabkan amanahnya pada konstituen masing-masing dapil. Berikut komisi-komisi di DPRD Jawa Tengah.

### **2.2.1 Komisi A**

Dalam komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh politisi Mohamad Saleh yang beranggotakan 23 orang. Komisi A sendiri membidangi mengenai pemerintahan. Fokus isu komisi A terdiri dari beberapa problematika yakni keamanan



dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertanahan, kepegawaian daerah, sosial politik, organisasi masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan aset daerah, dan pendidikan dan pelatihan kepegawaian.

### **2.2.2 Komisi B**

Untuk komisi B dipimpin langsung oleh Sumanto salah satu politisi di Jawa Tengah. Tupoksi Komisi B difokuskan dalam dunia perekonomian yang meliputi perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan dan keluautan, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, ketahanan pangan dan logistik, dunia usaha dan badan penanaman modal, dan koperasi UKM dan dunia usaha. Dalam Komisi B salah satu politisi petahana berhasil menduduki kursi wakil ketua.

### **2.2.3 Komisi C**

Bidang Keuangan berada di komisi C dan diketuai oleh Asfirla Harisanto. Komisi ini mengerjakan isu yang mencakup keuangan daerah, pendapatan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, badan usaha milik negara, perusahaan patungan dan penanaman modal dan badan layanan umum daerah.

### **2.2.4 Komisi D**

Hal yang berkaitan dengan bidang pembangunan diambil alih oleh komisi D. Alwin Basri selaku Ketua Komisi D beserta 23 anggotanya menyerap aspirasi masyarakat dengan isu terkait pembangunan seperti bina marga, cipta karya,

permukiman dan tata ruang, perumahan rakyat, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

### **2.2.5 Komisi E**

Sedangkan komisi terakhir membidangi tentang kesejahteraan rakyat dipimpin oleh Abdul Hamid. Tugas para anggota komisi E meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan teknologi, kepemudaan dan olahraga, keagamaan, kebudayaan, sosial, kesehatan, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

## **2.3 Organisasi Perempuan di Jawa Tengah**

Menilik perjalanan politisi perempuan melakukan suksesi dalam karier politiknya tidak dapat dilepaskan dari adanya organisasi perempuan non partai politik yang turut membantu politisi perempuan meraih banyak suara. Organisasi tersebut sebagai pengusung sekaligus basis massa politisi perempuan untuk meraih kemenangan kembali dikontestasi pileg Jawa Tengah. Elizabeth (2018) pengalaman berorganisasi menjadi modal penting bagi setiap anggota legislatif dalam merumuskan, melakukan tawar menawar atau menentukan sikap dalam pengambilan keputusan. Bermodalkan pengalaman organisasi politisi perempuan memiliki kemampuan manjerial serta keterampilan dalam berpolitik (Elizabeth, 2018). Peneliti mengategorikan organisasi perempuan yang pernah diikuti oleh politisi perempuan petahana di Jawa Tengah sebagai berikut.

### **2.3.1 Organisasi Perempuan Keagamaan**

Multikulturalisme masyarakat Indonesia secara agama melahirkan organisasi keagamaan berdasarkan ragam ideologi yang dianut dan diyakini masyarakat setempat. Dalam Islam misalnya ada dua organisasi besar keagamaan yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) dimana kedua organisasi induk tersebut melahirkan organisasi khusus perempuan untuk membantu menyebarkan nilai-nilai agama sesuai tujuan dari organisasi induknya.

#### **2.3.3.1 Aisyiyah**

Di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah, Aisyiyah sebagai organisasi perempuan yang bergerak berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadist mengamalkan serta berdakwah sesuai *amar makruf nahi munkar* ([aisyiyah.or.id/](http://aisyiyah.or.id/)). Kegiatan Aisyiyah pun tidak sebatas pengajian keagamaan namun juga merambah bidang ekonomi, pendidikan hingga politik. Dalam bidang pendidikan banyak Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes) Aisyiyah tersebar di Jawa Tengah. Ranah ekonomi kader-kader Aisyiyah mengajak para perempuan berdikari secara finansial dengan melakukan training-training kewirausahaan gratis kepada masyarakat.

Selain itu di lingkungan politik sendiri, Aisyiyah membantu kader terbaiknya ikut serta mengambil jalur politiknya dengan membantu pemenangan agar kader yang diusung meraih suara di kursi parlemen setiap pemilihan legislatif berlangsung,

sehingga aspirasi anggota Aisyiyah dan masyarakat umum khususnya konstituen di dapilnya bisa didengarkan serta direalisasikan demi kemaslahatan bersama. Terbukti hingga saat ini di kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah masih ada kader perempuan Aisyiyah dapat bertahan hingga lebih dari dua periode berturut-turut setiap ajang pileg di Jawa Tengah.

### **2.3.3.2 Muslimat**

Menjadi bagian dari badan otonom Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU), Muslimat berjuang keras menyuarakan dan memberdayakan kaum perempuan yang tersebar di seluruh Indonesia. Terbentuk ketika Mukhtamar NU ke-13 pada tahun 1983 adanya Muslimat simbol kebangkitan perempuan dikalangan NU ([muslimatnu.or.id/](http://muslimatnu.or.id/)). Muslimat di Jawa Tengah tidak pernah absen mengangkat kader perempuan terbaiknya untuk ambil andil berkontestasi di ajang politik. Di DPRD Provinsi Jawa Tengah pun ada beberapa kader Muslimat berhasil menduduki kursi anggota dewan lebih dari dua periode secara *continue*. Kekuatan suara kader perempuan Muslimat tidak bisa dipandang sebelah mata di Jawa Tengah, sebab keterikatan sesama kader begitu tinggi dan konsisten dari awal perjuangan hingga terpilihnya kembali para kader politisi pilihan Muslimat.

Muslimat bukan saja sebagai lembaga perempuan yang menyebarkan syiar-syiar ajaran Islam tetapi bisa digunakan sebagai kendaraan para kader Muslimat untuk ikut berikhtiar memberikan sumbangsuhnya di kancah perpolitikan agar bisa ikut ambil

andil meminimalisir permasalahan masyarakat khususnya kaum perempuan serta menyuarakan keinginan dari kaum *mustad'afin*.

### **2.3.2 Organisasi Perempuan Kemasyarakatan**

Ada beberapa macam organisasi kemasyarakatan yang ditemukan peneliti pernah diikuti oleh para politisi perempuan petahana sebelum berkiprah dalam panggung politik Jawa Tengah bahkan hingga sekarang pun politisi perempuan tetap aktif. Organisasi kemasyarakatan tersebut akan peneliti jabarkan dalam narasi berikut ini.

#### **2.3.2.1 Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)**

Kelahiran Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) berawal ketika tahun 1957 di Kota Bogor ([tppkk-pusat.org/](http://tppkk-pusat.org/)) sampai akhirnya PKK menjadi organisasi perempuan kemasyarakatan yang berhasil menggaet keanggotannya hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) di seluruh Indonesia. PKK sendiri beranggotakan ibu-ibu dimana kegiatan rutinnnya berkumpul sebulan sekali untuk membahas isu atau sekadar menyampaikan informasi pemerintah terkait permasalahan di daerahnya masing-masing.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan politisi perempuan petahana turut aktif berkontribusi membangun jejaring di PPK tempat tinggalnya. Bahkan meski kesibukan politisi perempuan petahana sangat padat apabila bisa menghadiri PKK di

daerahnya, mereka akan datang sekaligus mendengarkan aspirasi para ibu-ibu di dapilnya. Mengikuti PKK sebelum terpilih sebagai anggota dewan dan sesudah terpilih menjadi anggota dewan dirasa poin positif yang dapat dipetik oleh seluruh politisi perempuan petahana.

### **2.3.2.2 Jaringan Peduli Perempuan dan Anak**

Keanekaragaman organisasi perempuan di masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Tengah adalah bentuk keresahan terhadap maraknya problematika di masyarakat dari lini ekonomi, sosial hingga kesehatan. Salah satu organisasi perempuan yang konsen membantu menangani kasus perempuan dan anak yakni Jaringan Peduli Perempuan dan Anak atau lebih sering dikenal dengan sebutan JPPA.

Politisi perempuan petahana ada yang pernah bergabung dengan JPPA, sehingga relasi politisi perempuan tersebut semakin berkembang dan paham cara berkomunikasi hingga menyelesaikan beberapa problem di masyarakat terkait perempuan dan anak. Keaktifan itu tentu saja memberikan banyak manfaat pada pihak politisi perempuan petahan karena dengan begitu konstituen mengenalnya bukan sebagai politisi dadakan tetapi sebagai aktivis akar rumput yang kemudian menempuh jalur politik.

JPPA sendiri di Jawa Tengah merupakan sebuah organisasi yang menjadi rujukan bagi masyarakat di daerah Jawa Tengah untuk membantu menyelesaikan kasus terkait perempuan maupun anak yang mengalami kekerasan.

### **2.3.3 Organisasi Perempuan Kepemudaan**

Banyaknya organisasi kepemudaan di Indonesia menjadi wadah pembelajaran generasi muda melatih diri memimpin teman-temannya sebelum terjun langsung dalam organisasi politik. Di Jawa Tengah sendiri ada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) hingga Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI).

Selama melakukan penelitian, peneliti mendapatkan temuan bahwa ketika muda politisi perempuan petahana sebelum berkecimpung di lingkup politik praktis pernah aktif di organisasi perempuan kepemudaan. Politisi perempuan beberapa berangkat dari aktivis akar rumput, dimana mereka diamanahi posisi dalam organisasi tersebut. Lewat medium organisasi perempuan kepemudaan, keterampilan dan manajemen kepemimpinan mereka terasah dan jejaringnya pun dapat digunakan sampai mereka terpilih menjadi anggota dewan di level provinsi. Peneliti membagi menjadi dua organisasi perempuan kepemudaan.

### **2.3.3.1 KOHATI**

Dalam konstitusi Pedoman Dasar Kohati (PDK) diterangkan Korps HMI-Wati atau disingkat KOHATI merupakan organisasi otonom milik Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Organisasi tersebut terlahir sejak 17 September 1966 di Kota Solo (PDK, 2018) dimana tujuan diadakannya lembaga baru Kohati untuk membina muslimah berkualitas insan cita. Kohati berada dilingkup universitas di seluruh Indonesia. Beberapa politisi perempuan petahana DPRD Provinsi Jawa Tengah pernah didapuk sebagai Ketua Umum Kohati di level cabang.

Setelah tuntas menyelesaikan amanah di Kohati, politisi perempuan tersebut baru menggeluti politik praktis dan aktif di lembaga-lembaga tertentu. Manfaat yang diperoleh beberapa politisi perempuan yang aktif di Kohati yaitu dapat menggunakan relasi alumni Kohati bernama Forum Alumni Kohati (FORHATI) di dapil mereka. Peluang tersebut hanya bisa didapatkan oleh aktivis *grassroot* tanpa harus bersusah payah membangun komunikasi sejak awal.

### **2.3.3.2 KOPRI**

PMII pun membuat badan semi otonom yang memfokuskan pada isu perempuan pada tahun 1967 bernama Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri atau lebih dikenal KOPRI ([www.pmiuui.org/](http://www.pmiuui.org/)). Beberapa narasumber pernah aktif sebagai ketua maupun anggota Kopri di level universitas maupun cabang. Keaktifan



politisi perempuan petahana selama menjadi aktivis mahasiswa membuat mereka tidak susah untuk mengaktifkan kembali relasi yang sudah pernah dibangun selama menggeluti dunia aktivis.

### **2.3.4 Organisasi Keprofesian**

Tidak semua politisi perempuan di Jawa Tengah berangkat dari kader partai politik secara langsung, riwayat pekerjaan sebelumnya dari para politisi perempuan di Jawa Tengah membantu mereka memahami seluk beluk tata cara berorganisasi dengan baik sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Penelitian ini menemukan politisi perempuan petahana sebelum menghibahkan terjun di gelanggang politik, mereka aktif di organisasi sesuai profesi yang mereka tekuni.

#### **2.3.4.1 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)**

Organisasi pendidik atau tenaga pengajar juga pernah diikuti oleh salah satu politisi perempuan petahana di salah satu partai politik. Jiwa pengabdian dan mengajarnya untuk masyarakat begitu tinggi dan hal tersebut justru nilai tambah sang politisi mempermudah meraih hati konstituen. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) awalnya bernama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang berdiri tahun 1912, seiring konstalasi arus pendidikan akhirnya berubah menjadi PGRI (<http://pgri.or.id/>). PGRI menjadi tempat politisi perempuan untuk mulai memahami isu-isu dunia pendidikan sebelum dirinya bergerak lewat jalur politik.

### 2.3.4.2 Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Selain dunia pendidikan, keunikan politisi perempuan di Jawa Tengah yaitu ada yang menjadi tenaga kesehatan. Profesi medis namun menggeluti perpolitikan juga tidak mudah namun belajar dari politisi perempuan petahana Jawa Tengah justru berkat kemampuannya dibidang kesehatan akhirnya politisi tersebut dilirik oleh partai politik dan dielu-elukan oleh konstituen di daerah pemilihannya.

Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Jawa Tengah pernah dijakasi politis perempuan petahan meski tidak sebagai ketua, berkat kefasihannya membantu dan ikut keliling kader-kader partai akhirnya politisi perempuan tersebut “banting setir” agar bisa bertahan di kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah dan bisa terpilih lebih dari satu kali periode secara berturut-turut.

### 2.4 Profil Politisi Perempuan Petahana DPRD Jawa Tengah

Untuk mengumpulkan informasi terkait strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh politisi perempuan petahana DPRD Provinsi Jawa Tengah maka metode *sampling nonprobability* dengan teknik *purposive sampling* dianggap peneliti sangat penting. Berikut daftar tabel 2.4 nama narasumber dalam penelitian ini

No	Fraksi Partai	Nama Politisi	Status dan Komisi	Daerah Pemilihan
1	PDIP	RR. Maria Tria Magesti	Anggota Komisi C	Kota Semarang (D)
2	PDIP	Dyah Kartika Permanasari	Anggota Komisi B	Kota Salatiga, Kabupaten

				Semarang dan Kabupaten Kendal (II)
3	PDIP	Ayuning Sekar Suci	Anggota Komisi A	Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri (VI)
4	PDIP	Kadarwati	Anggota Komisi B	Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten (VII)
5	PDIP	Endrianingsih Yunita	Anggota Komisi E	Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali (VIII)
6	PDIP	Peni Dyah Perwitosari	Anggota Komisi B	Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo (IX)
7	PDIP	Sri Ruwiyati	Sekretaris Komisi E	Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen (X)
8	PDIP	Messy Widiastuti	Anggota Komisi E	Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes (XII)
9	PDIP	Irna Setiawati	Sekretaris Komisi A	Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang,

				Kabupaten Batang (XIII)
10	PKB	Nur Sa'adah	Anggota Komisi D	Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara (III)
11	PKB	Siti Rosidah	Anggota Komisi C	Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap (XI)
12	Golkar	Siti Ambar Fatonah	Anggota Komisi B	Kota Salatiga, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal (II)
13	Gerindra	Sri Hartini	Anggota Komisi D	Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara (III)
14	PAN	Sri Marnyuni	Wakil Ketua Komisi B	Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten (VII)
15	Demokrat	Kartina Sukawati	Anggota Komisi D	Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang (IV)